**Jurnal Ruang Sosialia**
Volume 02, Number 01, 2026 pp. 527-539
Open Access:

# Pemberdayaan masyarakat Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

**Sri Nur Islamiah Basri [1*], Resky Amalia Putri [2*], & Randi Febrianto [3*]**

[1, 2, & 3] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received March, 25, 2026
Revised April 01, 2026
Accepted April 10, 2026
Available online April 11, 2026

***Kata Kunci:***
Pemberdayaan Masyarakat; Kesejahteraan Sosial; Pekerjaan Sosial; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Sosial

**Keywords:**
*Community Empowerment; Social Welfare; Social Work; Community Participation; Social Development;*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Insan Ghani Cendekia.*

**ABSTRAK**

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada peningkatan kapasitas individu, kelompok, dan komunitas agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta menyelesaikan berbagai permasalahan sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberdayaan masyarakat sebagai strategi peningkatan kesejahteraan sosial, mengidentifikasi strategi implementasinya, serta mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai artikel jurnal nasional yang diterbitkan pada periode 2021–2026 dan dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan modal sosial, serta perluasan akses terhadap berbagai sumber daya. Keberhasilan pemberdayaan dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah, kolaborasi lintas sektor, kompetensi pendamping, serta pemanfaatan teknologi digital. Sebaliknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap modal dan informasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang partisipatif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk memperkuat keberfungsian sosial masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

***ABSTRACT***

*Community empowerment is an essential strategy in social welfare development that aims to strengthen the capacity of individuals, groups, and communities to improve their quality of life and address social problems independently and sustainably. This study aims to analyze the concept of community empowerment as a strategy for improving social welfare, identify its implementation strategies, and examine the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This study employed a qualitative approach using the library research method. Data were collected through document analysis of national journal articles published between 2021 and 2026 and analyzed using content analysis. The findings indicate that community empowerment plays a significant role in improving social welfare through strengthening community capacity, developing local potential, enhancing community participation, reinforcing social capital, and expanding access to various resources. The success of community empowerment is influenced by active community participation, government support, cross-sector collaboration, the competence of facilitators, and the utilization of digital technology. Conversely, limited human resource capacity, restricted access to capital and information, weak institutional coordination, and unequal access to resources remain major challenges in implementing empowerment programs. Therefore, participatory, inclusive, adaptive, and sustainable empowerment strategies are needed to strengthen community social functioning and achieve more equitable social welfare.*

*Corresponding author
E-mail addresses: reskyamaliaputri.uinam@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu, kelompok, maupun komunitas agar mampu mengenali potensi yang dimiliki, mengatasi berbagai permasalahan, serta mengambil keputusan secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab dalam menentukan arah perubahan sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat didorong untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, serta kemampuan membangun jejaring sosial yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan kapasitas sosial, memperkuat modal sosial, memperluas akses terhadap sumber daya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan social, (Setyawan dkk., 2025).

Pentingnya pemberdayaan masyarakat semakin terlihat dalam berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia. Berbagai program pembangunan telah mengubah paradigma yang semula berorientasi pada bantuan menjadi pendekatan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai aktor utama yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan partisipatif tersebut diyakini mampu menghasilkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, (Suaib, 2023).

Di Indonesia, implementasi pemberdayaan masyarakat terus berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan publik. Berbagai model pemberdayaan telah diterapkan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, pembentukan kelompok swadaya masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, hingga pengelolaan potensi desa. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga bertujuan membangun kemandirian, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan dimensi baru dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan media digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, mengikuti pelatihan, mengembangkan usaha, serta memperluas akses terhadap pasar dan jejaring kerja sama. Digitalisasi juga membuka peluang lahirnya berbagai inovasi pemberdayaan berbasis teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Namun demikian, kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta belum meratanya akses internet masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, (Abdullah dkk., 2025).

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial karena tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengembangan potensi lokal, serta perluasan partisipasi masyarakat, proses pemberdayaan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan memiliki daya tahan terhadap berbagai perubahan sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi yang relevan dalam mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan di berbagai daerah, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap modal dan informasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan. Selain itu, perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi menuntut adanya inovasi strategi pemberdayaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, (Jemalu dkk., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pemberdayaan masyarakat dalam berbagai konteks, seperti pemberdayaan ekonomi, pembangunan desa, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemberdayaan perempuan, maupun pengembangan potensi lokal. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi program dalam sektor atau wilayah tertentu. Kajian yang mengintegrasikan berbagai hasil penelitian untuk menjelaskan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui pendekatan library research masih relatif terbatas. Padahal, sintesis berbagai penelitian diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep, strategi, faktor pendukung, faktor penghambat, serta implikasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, (Kaseng, 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberdayaan masyarakat sebagai strategi peningkatan kesejahteraan sosial menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Data penelitian diperoleh dari berbagai artikel jurnal nasional yang relevan dan dianalisis menggunakan teknik content analysis. Penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kesejahteraan sosial; (2) bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial; dan (3) apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial serta menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang lebih efektif, partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis konsep, strategi, serta faktor pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesejahteraan sosial melalui sintesis berbagai sumber ilmiah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam hubungan antar konsep, pola pemikiran, serta dinamika teoritis yang berkembang dalam literatur ilmiah terkait pemberdayaan masyarakat, (Creswell, 2017).

Sumber data penelitian berasal dari data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi tahun 2021–2026 untuk menjaga kebaruan dan relevansi kajian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menyeleksi sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan jurnal nasional terakreditasi. Kata kunci yang digunakan meliputi "pemberdayaan masyarakat", "kesejahteraan sosial", "modal sosial", "partisipasi masyarakat", dan "pengembangan komunitas". Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi isi, kualitas jurnal, serta keterkaitan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis. Proses analisis meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data untuk menyaring literatur yang relevan, penyajian data dalam bentuk kategori tematik (konsep, strategi, faktor pendukung, dan faktor penghambat), serta penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis antar teori dan hasil penelitian terdahulu, (Krippendorff, 2023).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian dari penulis yang berbeda. Selain itu, digunakan juga teknik audit trail untuk memastikan proses analisis dapat ditelusuri secara sistematis dan konsisten (Husnullail dkk., 2024). Penelitian ini tidak melibatkan data lapangan langsung, sehingga validitas ditentukan melalui konsistensi literatur dan kedalaman analisis konseptual..

Sebagai bagian dari kajian pustaka, penelitian ini menyusun literatur utama yang menjadi rujukan analisis sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

| No. | Nama | Judul Penelitian | Tahun | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Setyobudi, T. | Pemberdayaan masyarakat melalui pemerintahan desa menuju kemandirian sosial | 2025 | PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat |
| 2. | Astuti, R., dkk. | Teori pemberdayaan dan pembangunan masyarakat | 2025 | Pradina Pustaka |
| 3. | Sholichah, H., dkk. | Systematic Literature Review: Pemberdayaan masyarakat inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial | 2025 | JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) |
| 4. | Nurhayati, E. | Integrasi perspektif sosiologi dan kesejahteraan sosial dalam upaya pemberdayaan kelompok rentan: Studi literatur komprehensif | 2025 | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Hukum(SENPISHUM) |
| 5. | Irmawati, dkk. | Dari desa untuk desa: Dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal | 2025 | PT Ganesha Kreasi Semesta |
| 6. | Setyawan, A. A., dkk. | Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal | 2025 | Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan |
| 7. | Susanto, D. A., dkk. | Pemberdayaan masyarakat | 2025 | CV Edu Akademi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Hilalludin, H., dkk. | Peran modal sosial dalam membangun ketahanan masyarakat pada era pascapandemi | 2025 | SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora |
| 9. | Sukmana, O., dkk. | Gerakan sosial dan pemberdayaan masyarakat | 2025 | Star Digital Publishing |
| 10. | Handini, N., dkk. | Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan | 2025 | Jurnal Ilmiah Nusantara |
| 11. | Rela, I. Z., dkk. | Teknologi digital dalam pemberdayaan ekonomi kreatif | 2025 | Mega Press Nusantara |
| 12. | Ahmad, S. N., dkk. | Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial desa | 2024 | Tohar Media |
| 13. | Islami, A. R. | Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Kabupaten Aceh Barat | 2024 | Program Studi Kebijakan Publik, Asdaf Kabupaten Aceh Barat |
| 14 | Habeahan, A., dkk | Strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif di era Society 5.0 | 2025 | Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat |
| 15. | Kasmawanto, Z. | Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Mandiri | 2025 | MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan |
| 16. | Hairuddin, dkk. | Peran dan Struktur Agensi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Urban: Studi Kasus Kota Makassar | 2025 | Development Policy and Management Review (DPMR) |
| 17. | Rahmawati, N. F., & Fatticia, R. | Analisis Strategi Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 2025 | Prosiding Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan |
| 18. | Hasanah, V. R., dkk. | Kompetensi Kader Motekar sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Ketahanan Keluarga | 2025 | Jurnal Keluarga Indonesia |

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan tiga fokus utama, yaitu (1) konsep pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kesejahteraan sosial, (2) strategi implementasi pemberdayaan masyarakat, serta (3) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Temuan diperoleh melalui sintesis literatur ilmiah yang relevan serta analisis konten dari berbagai sumber akademik yang membahas pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesejahteraan sosial periode 2021–2026.

**1) Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses sosial yang bersifat sistemik, dinamis, dan berorientasi jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas individu, kelompok, dan komunitas. Proses ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada perubahan struktur sosial yang memengaruhi relasi kuasa, akses sumber daya, dan kemampuan masyarakat dalam menentukan arah kehidupannya secara mandiri. Pemberdayaan dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme transformasi sosial yang menggeser masyarakat dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian sosial dan ekonomi (Setyobudi, 2025).

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat diposisikan sebagai pendekatan pembangunan yang berbasis hak sosial dan keadilan distributif. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mengakses kesempatan sosial secara setara. Oleh karena itu, pemberdayaan menjadi instrumen penting dalam menciptakan inklusi sosial yang lebih luas dalam sistem pembangunan(Nurhayati, 2025).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat memiliki struktur multidimensi yang terdiri dari tiga level utama. Pada level pertama, pemberdayaan menyasar penguatan kapasitas individu melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran kritis, dan kemampuan pengambilan keputusan. Pada level kedua, pemberdayaan berlangsung dalam konteks kelompok sosial melalui penguatan solidaritas, kerja sama, dan pembentukan jaringan sosial yang produktif. Pada level ketiga, pemberdayaan menyentuh aspek kelembagaan dan struktur sosial yang menentukan distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Ketiga level ini saling terhubung dalam membentuk ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan saling memperkuat (Ariyanti dkk., 2025).

Pemberdayaan masyarakat juga mencakup perluasan akses terhadap sumber daya strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, informasi, teknologi digital, serta peluang ekonomi produktif. Akses ini berperan sebagai faktor kunci dalam mengurangi ketimpangan struktural yang selama ini menjadi penyebab utama ketidakberdayaan sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya menghasilkan peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat posisi sosial masyarakat dalam struktur sosial yang lebih luas serta meningkatkan mobilitas sosial antar kelompok (Sholichah dkk., 2025).

Dalam perspektif kesejahteraan sosial berbasis HBSE, pemberdayaan berkaitan erat dengan konsep keberfungsian sosial yang mencakup interaksi antara individu, lingkungan sosial, dan struktur kebijakan. Pada level mikro, pemberdayaan meningkatkan kapasitas psikososial individu dalam mengambil keputusan. Pada level meso, pemberdayaan memperkuat relasi sosial dan jaringan komunitas. Pada level makro, pemberdayaan dipengaruhi oleh kebijakan, sistem ekonomi, dan struktur sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dipahami sebagai hasil interaksi tiga level sistem sosial tersebut (Nurhayati 2025).

Partisipasi masyarakat menjadi komponen fundamental dalam pemberdayaan karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, distribusi kekuasaan, serta penguatan legitimasi program pembangunan. Partisipasi yang bermakna mencerminkan adanya kesadaran kritis masyarakat terhadap kondisi sosialnya serta kemampuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Partisipasi juga menjadi indikator utama keberhasilan transformasi sosial dalam masyarakat (Irmawati dkk., 2025).

**2) Strategi Implementasi Pemberdayaan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat bersifat kontekstual, fleksibel, dan berbasis pada kebutuhan lokal. Strategi ini tidak dapat diseragamkan karena setiap komunitas memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan harus adaptif terhadap kondisi tersebut. Pendekatan ini juga menuntut integrasi antara dimensi individu, komunitas, dan struktur kebijakan dalam satu sistem pemberdayaan yang utuh. Strategi pemberdayaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sosial dan institusional. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesesuaian konteks sosial. Strategi ini juga harus mampu merespons dinamika perubahan sosial yang cepat. Pendekatan berbasis sistem menjadi penting dalam memastikan keberlanjutan program.

**a. Penguatan kapasitas masyarakat**

Penguatan kapasitas masyarakat mencakup pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta peningkatan literasi sosial dan ekonomi. Strategi ini bertujuan membangun kapasitas kognitif, afektif, dan psikomotor masyarakat agar mampu memahami masalah sosial secara lebih kritis dan merumuskan solusi berbasis potensi yang dimiliki. Dalam kerangka HBSE, penguatan kapasitas ini merupakan proses pengembangan human agency yang memperkuat kemampuan individu dalam mengontrol kehidupannya sendiri dalam struktur sosial yang lebih luas. Penguatan kapasitas juga mencakup peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Selain itu, proses ini memperkuat kepercayaan diri individu dalam mengambil keputusan. Pada level komunitas, hal ini memperkuat interaksi sosial yang produktif. Secara keseluruhan, penguatan kapasitas menjadi fondasi utama pemberdayaan (Darmawan dkk., 2025).

**b. Pengembangan potensi lokal**

Pengembangan potensi lokal dilakukan melalui optimalisasi sumber daya berbasis wilayah seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Strategi ini memperkuat ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan sosial ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan harus bertumpu pada kekuatan internal komunitas, bukan hanya intervensi eksternal. Penguatan potensi lokal juga menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis wilayah. Selain itu, strategi ini memperkuat identitas sosial ekonomi masyarakat. Pada level meso, hal ini memperkuat solidaritas ekonomi komunitas. Pada level makro, strategi ini mengurangi ketergantungan terhadap sistem ekonomi eksternal (Setyawan dkk., 2025).

**c. Peningkatan partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat menjadi elemen inti dalam keberhasilan pemberdayaan. Partisipasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Partisipasi yang tinggi menciptakan rasa kepemilikan sosial yang memperkuat keberlanjutan program serta meningkatkan efektivitas hasil pembangunan sosial. Dalam perspektif HBSE, partisipasi memperkuat hubungan antara individu dan sistem sosial secara simultan. Partisipasi juga menjadi mekanisme redistribusi kekuasaan dalam komunitas. Selain itu, partisipasi meningkatkan transparansi sosial dalam program pembangunan. Hal ini memperkuat keberlanjutan intervensi sosial (Susanto dkk., 2025).

**d. Penguatan modal sosial**

Modal sosial mencakup jaringan sosial, kepercayaan, norma, dan nilai kolektif yang menjadi dasar interaksi sosial dalam masyarakat. Modal sosial berfungsi sebagai mekanisme koordinasi sosial yang memperkuat kerja sama, solidaritas, dan stabilitas komunitas. Dalam konteks pemberdayaan, modal sosial menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi program di tingkat lokal. Kepercayaan sosial memperkuat stabilitas hubungan antar individu. Jaringan sosial memperluas akses sumber daya dan informasi. Norma sosial menjaga keteraturan dalam interaksi komunitas. Pada level meso, modal sosial menjadi pengikat utama sistem komunitas (Hilalludin dkk., 2025).

**3) Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor individu, komunitas, dan struktur kebijakan yang saling berhubungan dalam sistem sosial yang lebih luas. Analisis ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak dapat dipahami secara linear, tetapi harus dilihat sebagai sistem yang saling memengaruhi antar level sosial. Pada level mikro, faktor individu menjadi penting dalam menentukan respons terhadap program. Pada level meso, komunitas menjadi ruang interaksi sosial. Pada level makro, kebijakan menjadi struktur pengarah utama. Ketiga level ini membentuk dinamika pemberdayaan yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan sistemik menjadi penting dalam analisis pemberdayaan.

**a. Faktor pendukung**

Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan. Partisipasi mencerminkan tingkat kesadaran sosial, keterlibatan, dan tanggung jawab kolektif dalam proses pembangunan sosial di lingkungannya (Sukmana dkk., 2025).

Dukungan kebijakan pemerintah menciptakan kerangka regulasi yang memungkinkan program pemberdayaan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal memperkuat integrasi antara program pembangunan dan realitas sosial masyarakat. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat memperkuat efektivitas implementasi program melalui integrasi sumber daya, inovasi, dan pengetahuan. Sinergi ini menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, (Handini dkk., 2025).

Peran fasilitator menjadi komponen penting dalam proses transformasi sosial. Fasilitator berfungsi sebagai penghubung antara struktur kebijakan dan realitas sosial masyarakat, sekaligus sebagai agen perubahan yang mendorong peningkatan kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital memperluas ruang pemberdayaan dengan menciptakan akses informasi yang lebih cepat, memperkuat komunikasi sosial, serta membuka peluang ekonomi berbasis digital yang lebih inklusif, (Rela dkk., 2025).

**b. Faktor penghambat**

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan struktural utama dalam pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, dan pengalaman sosial yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola program secara mandiri (Ahmad dkk., 2024).

Keterbatasan akses terhadap modal, informasi, dan teknologi memperkuat ketimpangan sosial antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan hasil dari struktur sosial yang tidak merata.

Lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih program. Kondisi ini mengurangi efektivitas implementasi pemberdayaan serta menciptakan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan (Islami, 2024).

Ketimpangan antarwilayah memperkuat disparitas sosial dan ekonomi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan persoalan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan jangka panjang.

Kurangnya keberlanjutan program menunjukkan bahwa banyak intervensi pemberdayaan masih bersifat jangka pendek. Tanpa mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, dampak pemberdayaan tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang di masyarakat.

## 3.2 Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan menafsirkan dan menganalisis temuan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai strategi peningkatan kesejahteraan sosial. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil temuan pada konsep teoritis pemberdayaan masyarakat, pendekatan keberfungsian sosial, serta hasil penelitian terdahulu, sehingga memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai peran pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian sosial, memperkuat kapasitas komunitas, serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

**1) Analisis Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada transformasi struktur sosial. Pendekatan ini menggeser paradigma pembangunan dari bantuan karitatif menuju penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat sebagai aktor utama pembangunan sosial (Sukmana dkk., 2025). Dalam kerangka ini, pemberdayaan tidak lagi dipahami sebagai intervensi sesaat, tetapi sebagai proses sosial yang berlangsung terus-menerus dan membentuk ulang relasi antara individu, komunitas, dan negara.

Pada level praktik, pemberdayaan bekerja melalui perubahan cara pandang masyarakat terhadap dirinya sendiri. Individu tidak lagi ditempatkan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan hidup. Perubahan ini penting karena banyak persoalan sosial berakar dari ketergantungan struktural yang melemahkan inisiatif masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika kapasitas meningkat, masyarakat mulai mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengambil keputusan secara lebih mandiri.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas seperti kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, mengakses layanan publik, serta memiliki posisi tawar dalam struktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dari kemampuan masyarakat untuk mengontrol kehidupannya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan dengan demikian menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan struktural yang sering membatasi perkembangan masyarakat pada level akar rumput (Habeahan dkk., 2025).

Jika dianalisis melalui perspektif HBSE, pemberdayaan bekerja secara simultan pada tiga level yang saling memengaruhi. Pada level mikro, individu mengalami peningkatan kapasitas berupa pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan kesadaran kritis yang memengaruhi cara mereka bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pada level meso, pemberdayaan memperkuat relasi sosial dalam komunitas melalui pembentukan jaringan, solidaritas, dan dukungan sosial yang lebih terstruktur. Pada level makro, sistem kebijakan, struktur ekonomi, dan distribusi kekuasaan menentukan sejauh mana akses terhadap sumber daya dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat. Ketiga level ini membentuk satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam praktik sosial, pemberdayaan juga sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan struktur lokal. Masyarakat dengan tingkat partisipasi sosial yang tinggi cenderung lebih mudah menerima program pemberdayaan karena sudah memiliki modal sosial yang kuat. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kepercayaan sosial rendah sering mengalami hambatan dalam proses implementasi program. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang kompleks, multidimensi, dan sangat bergantung pada interaksi antara individu, komunitas, dan struktur sosial. Proses ini tidak dapat dipercepat secara instan karena menyangkut perubahan nilai, perilaku, dan sistem sosial secara menyeluruh.

**2) Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat bersifat multidimensi, adaptif, dan saling terintegrasi. Keberhasilan program tidak ditentukan oleh satu pendekatan tunggal, tetapi oleh kombinasi antara penguatan kapasitas, pengembangan potensi lokal, partisipasi masyarakat, dan modal sosial, (Kasmawanto, 2025). Keempat elemen ini bekerja sebagai satu sistem yang saling memperkuat dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di tingkat komunitas.

Penguatan kapasitas masyarakat menjadi fondasi utama dalam proses pemberdayaan. Kapasitas tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis,

kesadaran sosial, serta kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam banyak kasus, masyarakat yang tidak memiliki kapasitas yang cukup cenderung bergantung pada bantuan eksternal sehingga proses pemberdayaan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum intervensi lainnya dilakukan.

Pengembangan potensi lokal menunjukkan bahwa pemberdayaan yang efektif harus bertumpu pada sumber daya yang dimiliki komunitas itu sendiri. Pendekatan ini memperkuat ekonomi berbasis wilayah seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dengan memanfaatkan potensi lokal, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih stabil, mandiri, dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat identitas sosial-ekonomi komunitas yang menjadi dasar penting dalam pembangunan jangka panjang, (Habeahan dkk., 2025).

Partisipasi masyarakat menjadi elemen yang menentukan keberhasilan atau kegagalan program pemberdayaan. Partisipasi yang bersifat simbolik tidak cukup untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Dibutuhkan partisipasi substantif yang mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ketika masyarakat terlibat secara aktif, mereka memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap program sehingga keberlanjutan hasil lebih terjamin, (Susanto dkk., 2025).

Modal sosial berfungsi sebagai fondasi yang menjaga keberlangsungan interaksi sosial dalam komunitas. Kepercayaan antaranggota masyarakat, norma sosial yang disepakati, serta jaringan sosial yang kuat menjadi faktor penting dalam memperlancar pelaksanaan program pemberdayaan. Modal sosial juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga stabilitas hubungan dalam komunitas. Tanpa modal sosial yang kuat, program pemberdayaan cenderung berjalan terfragmentasi dan kurang efektif.

Jika dilihat secara lebih luas, strategi pemberdayaan tidak hanya bekerja pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial. Masyarakat yang mengalami proses pemberdayaan yang baik akan menunjukkan perubahan dalam cara berpikir, cara berinteraksi, dan cara mengambil keputusan. Perubahan ini menjadi indikator penting bahwa pemberdayaan tidak hanya menghasilkan output ekonomi, tetapi juga transformasi sosial yang lebih dalam.

**3) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor individu, komunitas, dan struktur sosial yang lebih luas. Interaksi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan sistem sosial yang dinamis dan tidak dapat dipahami secara parsial, (Hairuddin, Muhammad, & Rahim, 2025).

Faktor pendukung utama dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi mencerminkan tingkat kesadaran sosial, keterlibatan, dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi cenderung lebih mudah menerima program karena merasa memiliki keterlibatan langsung dalam prosesnya. Hal ini juga memperkuat legitimasi sosial program di tingkat komunitas.

Dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor struktural yang sangat menentukan keberhasilan program. Kebijakan yang responsif, konsisten, dan berbasis kebutuhan lokal mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pemberdayaan. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, program sering mengalami hambatan dalam hal pendanaan, koordinasi, dan keberlanjutan.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas program. Keterlibatan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat menciptakan sinergi yang memperluas sumber daya dan meningkatkan kualitas implementasi program. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan inovasi yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah sosial di tingkat komunitas, (Rahmawati, Fajri, & Fatticia, 2025).

Peran fasilitator memiliki posisi strategis dalam proses pemberdayaan. Fasilitator tidak hanya berfungsi sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, fasilitator berperan sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat membangun kesadaran kritis, kepercayaan diri, dan kemampuan organisasi sosial.

Pemanfaatan teknologi digital memberikan dimensi baru dalam pemberdayaan masyarakat modern. Teknologi memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, memperluas jaringan komunikasi, serta membuka peluang ekonomi baru berbasis digital. Hal ini menjadikan pemberdayaan lebih inklusif dan relevan dengan perkembangan sosial kontemporer, (Hasanah, Gaol, & Kamarubiani, 2026).

Terdapat sejumlah hambatan yang masih menghambat efektivitas pemberdayaan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama karena memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami, mengelola, dan mengembangkan program secara mandiri. Kondisi ini sering berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan dan informasi, (Widiyana, Mansyur, & Mulhimmah, 2025).

Keterbatasan akses terhadap modal, informasi, dan teknologi memperkuat ketimpangan sosial antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pemberdayaan tidak hanya bersifat individu, tetapi juga struktural. Ketimpangan ini menyebabkan hasil program tidak merata dan cenderung hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Lemahnya koordinasi antar lembaga juga menjadi masalah yang sering muncul dalam implementasi program. Banyak program berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang jelas sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi sumber daya, (Nasution, 2025).

Kurangnya keberlanjutan program menjadi tantangan serius dalam pemberdayaan masyarakat. Banyak program hanya berjalan dalam jangka pendek tanpa mekanisme evaluasi yang kuat. Akibatnya, dampak pemberdayaan tidak bertahan lama dan tidak menghasilkan perubahan struktural yang signifikan dalam masyarakat.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

Pemberdayaan masyarakat terbukti menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan kapasitas individu, pengembangan potensi lokal, peningkatan partisipasi, serta penguatan modal sosial. Proses ini bekerja secara sistemik pada tiga level, yaitu mikro, meso, dan makro, yang saling berhubungan dalam membentuk keberfungsian sosial masyarakat. Pada level mikro, pemberdayaan meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan dan mengelola kehidupan. Pada level meso, pemberdayaan memperkuat jaringan sosial dan solidaritas komunitas. Pada level makro, pemberdayaan dipengaruhi oleh kebijakan, struktur ekonomi, dan distribusi sumber daya yang menentukan akses masyarakat terhadap kesejahteraan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi oleh interaksi antara faktor pendukung dan penghambat. Partisipasi masyarakat, dukungan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, peran fasilitator, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penguat utama. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan akses, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan rendahnya keberlanjutan program masih menjadi hambatan struktural yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan agar kesejahteraan sosial dapat tercapai secara lebih merata dan berkeadilan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, atas dukungan akademik, fasilitas, serta akses terhadap sumber daya ilmiah yang menunjang pelaksanaan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pelayanan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial), Muh. Syahrur, S.Sos., M.Si., atas bimbingan, arahan, dan masukan akademik yang diberikan selama proses pembelajaran dan penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada para peneliti dan penulis karya ilmiah yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, serta kepada teman-teman yang telah membersamai dan bekerja sama dalam proses diskusi,

pertukaran gagasan, dan dukungan selama penelitian berlangsung. Seluruh dukungan tersebut berkontribusi penting terhadap terselesaikannya penelitian ini dengan baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., dkk. (2025). Pengembangan masyarakat berbasis digital. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KHBeEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:T2wHlXfmHm4J:scholar.google.com/&ots=2x9uocBVbb&sig=6PUXD5phKwm8tmDcUlZwxpxxS8U&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Ahmad, S. N., dkk. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial desa. Tohar Media. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1rcpEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:dQQTX58iZzAJ:scholar.google.com/&ots=2fKDz4X1-T&sig=CVnFnelYgsYRj_c56sn-THMsfs8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Ariyanti, K. S., Prasetyo, B., Helminasari, S., & Abigayl, I. (2025). Teori pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Pradina Pustaka. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=FuF0EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:M2eQbZtD2NkJ:scholar.google.com/&ots=2UHuvF0x1Q&sig=dMcApF5cngDQfr5zEG1IsRBzEXA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=335ZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16&dq=info:Irl05F2Tc1IJ:scholar.google.com/&ots=YEASHNtpnM&sig=4Y7pAP3M3hS78crKbzC7uuN816s&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Darmawan, A., Ulum, B., & Aminah, S. (2025). Penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi pendidikan dan kewirausahaan: Upaya sinergis meningkatkan kesejahteraan dan kohesi sosial di Desa Sinduwati. Journal of Community Studies and Services, 1(1), 69–80. https://journal.stai-ypbwi.ac.id/index.php/JComSS/article/view/626

Habeahan, A., dkk. (2025). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif di era Society 5.0. Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat, 3(4), 312–324. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/japm/article/view/5952

Hairuddin, dkk. (2025). Peran dan struktur agensi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat urban: Studi kasus Kota Makassar. Development Policy and Management Review, 5(2), 143. https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/article/view/48596

Handini, N., dkk. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(5), 964–986. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5793

Hasanah, V. R., Gaol, W. F. L., & Kamarubiani, N. (2026). Kompetensi kader Motekar sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penguatan ketahanan keluarga. Jurnal Keluarga Indonesia, 1(1), 1–21. https://jurnal.knpkindonesia.org/index.php/jki/article/view/8

Hilalludin, H., dkk. (2025). Peran modal sosial dalam membangun ketahanan masyarakat pada era pascapandemi. SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(2), 15–29. https://www.risetcendikia.com/index.php/jurnal-scinusa/article/view/58

Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. Jurnal Genta Mulia, 15(2), 70–78. https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/1148

Irmawati, Mukhlis, & Salman. (2025). Dari desa untuk desa: Dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. PT Ganesha Kreasi Semesta. https://repository.umsinjai.ac.id/id/eprint/149/

Jemalu, S. S., Wulandary, R. M. C., & Purwatiningsih, A. (2025). Evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian (Studi pada Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu). JADMENT: Journal of Administration & Development, 2(1), 186–193. https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/article/view/24

Kaseng, E. S. (2025). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dalam pengembangan UMKM. Journal of Marginal Social Research, 2(1), 1–8. https://ejournal.arenasosial.web.id/index.php/jomasore/article/view/17

Kasmawanto, Z. (2025). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Mandiri. MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 17(2), 223. https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/10701

Krippendorff, K. (2023). The reliability of generating data. CRC Press. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Krippendorff%2C+K.+%282023%29.+The+reliability+of+generating+data.&btnG=#d=gs_qabs&t=1783067912909&u=%23p%3DHI4FB8bHAsIJ

Nasution, C. (2025). Koordinasi dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Indramayu (N. Duniawati, Ed.). CV. Adanu Abimata. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mQOGEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA83&dq=info:SKKcH-AFsHAJ:scholar.google.com/&ots=M9-NFWn2Lj&sig=1UvNfBKm2FABXmlf2mxACoTv0ak&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Nurhayati, E. (2025). Integrasi perspektif sosiologi dan kesejahteraan sosial dalam upaya pemberdayaan kelompok rentan: Studi literatur komprehensif. Dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Hukum (SENPISHUM) Tahun 2025 (hlm. 1–22). https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/senpishum/article/view/62510

Rahmawati, N. F., & Fatticia, R. (2025). Analisis strategi kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Prosiding Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan, 4, 422. https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/358

Rela, I. Z., dkk. (2025). Teknologi digital dalam pemberdayaan ekonomi kreatif. Mega Press Nusantara. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=petnEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=info:Cj2r7Kz3OFwJ:scholar.google.com/&ots=sNM_lkC9Ce&sig=lF7X-2M_O1CeXqL62cDUuvUao_Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Setyawan, A. A., dkk. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(1), 1494–1503. https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/1769

Setyobudi, T. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui pemerintahan desa menuju kemandirian sosial. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 10(3), 824–843. https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/8629

Sholichah, H., dkk. (2025). Systematic literature review: Pemberdayaan masyarakat inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial. JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora), 11(1), 27–40. https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/664

Suaib. (2023). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (U. Nain, Ed.). Penerbit Adab. https://ejournal-nipamof.id/index.php/PPIMAN/article/view/1302

Sukmana, O., dkk. (2025). Gerakan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Star Digital Publishing. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YaWIEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA95&dq=info:JAUE35SJI5EJ:scholar.google.com/&ots=nmaCgeyUZ_&sig=-dBUQaN8eSXnMipg0cVpM3iTwzE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Susanto, D. A., dkk. (2025). Pemberdayaan masyarakat (H. Hardin, Ed.). CV Edu Akademi. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8UGlEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:UQt9EvjVdQMJ:scholar.google.com/&ots=jZVGjF1ppa&sig=Rpelb-zKC97cLFYARBQf5l3lqJM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2025). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 8(1), 235. https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/22940